

ABSTRAK

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 diatur mengenai jenis dan tarif atas penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional khususnya pada pengaturan biaya dalam pemberian pertimbangan teknis dalam rangka izin lokasi. Penentuan biaya dalam izin lokasi belum memberikan kepastian hukum karena tidak ada perincian secara spesifik mengenai biaya yang harus ditanggung oleh pemohon dalam rangka izin lokasi yang tidak sesuai dengan besarnya biaya yang diatur dalam rumusan Pasal 4 PP. No. 13 Tahun 2010 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Dalam hal pemohon merasa dirugikan maka upaya hukum yang dilakukan adalah Melakukan upaya hukum administrasi dan gugatan yang dirumuskan dalam Pasal 47 UU No. 9 Tahun 2004 Tentang PTUN.

Kata kunci : Pengaturan Biaya, Izin Lokasi, Kepastian Hukum